

**RESPONSIBILITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERHADAP *MASTERPLAN* PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DALAM MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DI
KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Konsentrasi Pemerintahan Daerah



diajukan oleh:

MUHAMMAD ZULAZMI

20610051

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN
TESIS
RESPONSIBILITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERHADAP *MASTERPLAN* PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DALAM MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DI
KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh:
MUHAMMAD ZULAZMI
20610051

Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal 10 Agustus 2022

Susunan Tim Penguji

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)

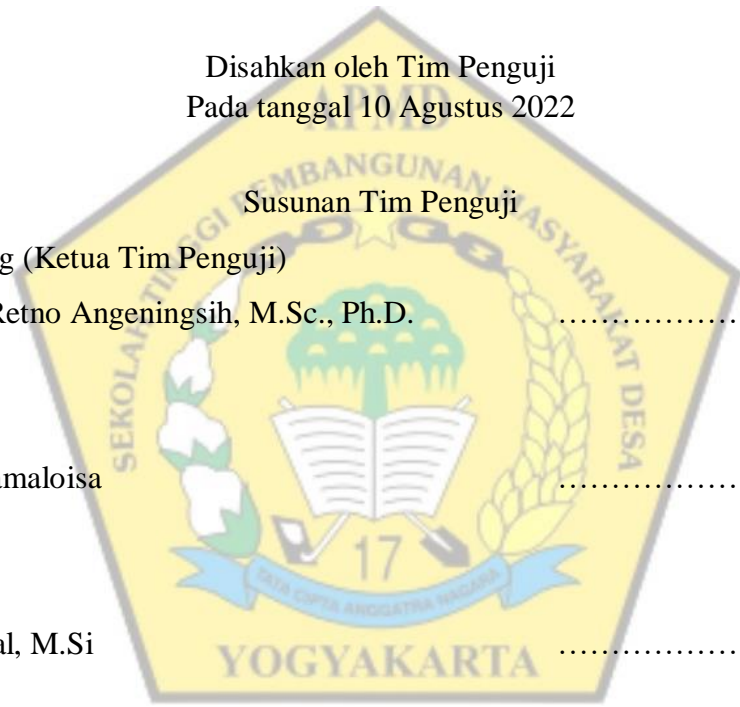
Rr. Leslie Retno Angeningsih, M.Sc., Ph.D.

Penguji II

Dr. Rijel Samaloisa

Penguji III

Dr. Supardal, M.Si



Yogyakarta, 10 Agustus 2022

Mengetahui

Direktur Program Magister

Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, peneliti:

Nama : **MUHAMMAD ZULAZMI**

Nomor Induk Mahasiswa : **20610051**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul peneliti **RESPONSIBILITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP *MASTERPLAN* PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA** adalah benar-benar karya peneliti sendiri. Hal-hal yang bukan karya peneliti dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan peneliti ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang peneliti peroleh melalui tesis ini.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD ZULAZMI

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas hidayah dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis berjudul **“RESPONSIBILITAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP MASTERPLAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DALAM MENGATASI PERSOALAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan, atas hal itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak yang berkepentingan dengan tesis ini guna memperbaiki di kemudian hari.

Peneliti menyadari bahwa, penyusunan tesis ini, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tidak akan berjalan dengan baik. Bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan sangat membantu peneliti dalam proses menyelesaikan tesis ini. Atas dasar itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Supardal, M.Si, selaku Direktur Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta beserta jajaran dan karyawan.
3. Rr. Leslie Retno Angeningsih, M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing tesis.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas Perdagangan kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu informan yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data kepada peneliti.
9. Ibunda Sumarni, S.Pd. yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan, juga kepada Istri tercinta Sischa Nurastuti, SE. yang setia mendampingi dan memberikan dukungan maksimal, dan kepada Ananda Zaid Romadhoni semoga menjadi anak yang sholih membanggakan orangtua.
10. Teman-teman mahasiswa prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Angkatan 26.

Dengan hati yang tulus dan ikhlas peneliti berdo'a, semoga amal baik Bapak, Ibu dan saudara mendapat ganti dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan semoga tesis ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tema yang terkait dengan kebijakan pengelolaan persampahan. dan bermanfaat bagi para pembaca, amin.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Penulis

MUHAMMAD ZULAZMI

MOTTO

“...Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al Anfal : 60)

Barangsiapa yang niat (tujuan) hidupnya adalah negeri akhirat, Allâh akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangnya dalam keadaan hina. (HR. Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua orangtua Ayahanda *Allahuyarham* Anis Kasim, BA dan Ibunda Sumarni, S.Pd. yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendukung ananda.
2. Istri tercinta Sischa Nurastuti, SE yang telah setia mendampingi, maafkan waktu-waktu yang hilang karena studi, tugas dan pekerjaan.
3. Ananda Zaid Romadhoni semoga menjadi anak sholih, cerdas, berbakti, berani, mandiri, membanggakan orangtua, umat dan bangsa.
4. Majelis Malem Kemisan Sorosutan, yang telah menginspirasi kerja-kerja kedinasan dan kemasyarakatan di Kelurahan Sorosutan.
5. Rekan-rekan *TRUST*, sedulur saklawase yang selalu menguatkan.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Konseptual	8
G. Penelitian Terdahulu	26
H. Kerangka Pikir Peneliti.....	29
I. Metode Penelitian	30
BAB II	40
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	40
A. Wilayah Kota Yogyakarta	40
B. Kondisi Eksisting Persampahan di Kota Yogyakarta	53
BAB III	70
HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Responsibilitas Bappeda Terhadap Pengelolaan Persampahan	70
B. Implementasi dan Hambatan <i>Masterplan</i> Pengelolaan Persampahaan.....	89

BAB IV	99
PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pengelolaan sampah yang terdiri dari upaya pengurangan di hulu dan penanganannya	5
Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian.....	29
Gambar 2. 1 Peta administrasi kota Yogyakarta	42
Gambar 2. 2 Bentuk Lahan Kota Yogyakarta	45
Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Yogyakarta.....	47
Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu	26
Tabel 1. 2 Daftar informan	33
Tabel 2. 1 Nama dan Luas Wilayah per Kemantren serta jumlah Kelurahan	41
Tabel 2. 2 Data Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021	43
Tabel 2. 3 Pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2016-2021 ...	48
Tabel 2. 4 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2016-2021	51
Tabel 2. 5 Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2021 Kota Yogyakarta.....	52
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta 2021	55
Tabel 2. 7 Pengelolaan sampah	66

INTISARI

Isu persampahan merupakan isu global yang harus dipecahkan dengan solusi terbaik, pembuangan sampah yang tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang terstruktur, akan membocorkan gas rumah kaca berbahaya dan berkontribusi pada perubahan iklim. Bukan hanya dilevel global, permasalahan sampah harus ditangani sejak dini mulai dari pemerintaah negara, pemerintah daerah hingga sumber sampah itu sendiri. Timbulan sampah saat ini di kota Yogyakarta sudah mencapai 360 ton/hari, melebihi rata-rata nasional yaitu 0,7 kg/hari. Atas dasar itu penting hadirnya *masterplan* untuk menyelesaikan persoalan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mencermati bagaimana Responsibilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Terhadap *Masterplan* Pengelolaan Persampahan Dalam Mengatasi Persoalan Sampah di Kota Yogyakarta.

Penelitian dilakukan metode deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif, informan berjumlah 5 orang yang bersangkutan secara langsung ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, data primer dikumpulkan melalui observasi, interview mendalam dan focus group discussion, data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Data sekunder dan primer dintegrasikan melalui konten analisis.

Hasil penelitian ditemukan bahwa responsibilitas Bappeda dalam penerapan *masterplan* pengelolaan persampahan pada saat ini belum terlihat secara langsung dan masih belum tercapai secara keseluruhan, organisasi perangkat daerah masih membentuk kajian untuk penganggaran di tahun berikutnya demi terealisasinya kegiatan oprasional sesuai dengan *masterplan*. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengatasi persoalan persampahan masing-masing bagian organisasi perangkat daerah harus menerapkan fungsi dan tugasnya sesuai dengan *masterplan*. Perlu adanya penelitian lanjutan di masa yang akan datang untuk mengetahui sejauh mana efektifitas *masterplan* dalam menangani persoalan persampahan di kota Yogyakarta.

Kata kunci: Kebijakan, Startegi, *Masterplan*, Persampahan,

ABSTRACT

The issue of waste is a global issue that must be solved with the best solution, waste disposal that is not accompanied by structured waste management will leak harmful greenhouse gases and contribute to climate change. Not only at the global level, the waste problem must be handled early on from the state government, local government to the source of the waste itself. The current generation of waste in the city of Yogyakarta has reached 360 tons/day, exceeding the national average of 0.7 kg/day. On that basis, it is important to have a masterplan to solve the waste problem. This study aims to examine how the Responsibilities of the Regional Development Planning Agency (Bappeda) to the Waste Management Masterplan in Overcoming the Waste Problem in the City of Yogyakarta.

The research was conducted using a descriptive-exploratory method with a qualitative approach, the number of informants was 5 people who were directly determined using purposive sampling technique, primary data was collected through observation, in-depth interviews and focus group discussions, secondary data was collected using library research techniques. Secondary and primary data are integrated through content analysis.

The results of the study found that the responsibility of Bappeda in implementing the waste management masterplan at this time has not been seen directly and has not been achieved as a whole, regional apparatus organizations are still forming studies for budgeting in the following year for the realization of operational activities in accordance with the masterplan. To achieve maximum results in overcoming waste problems, each part of the regional apparatus organization must implement its functions and duties in accordance with the masterplan. There is a need for further research in the future to find out how effective the masterplan is in dealing with solid waste problems in the city of Yogyakarta.

Keywords: Policy, Strategy, Masterplan, Solid Waste.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambahan jumlah volume sampah yang diproduksi oleh penduduk dunia menjadi salah satu isu yang dihadapi bersama selama ini. Persoalan sampah telah menjadi masalah global yang perlu mendapatkan perhatian serius (Husadi & Namara, 2019). Manusia menghasilkan jumlah sampah yang luar biasa, lebih dari 2 miliar ton per tahun menurut Bank Dunia, atau sekitar 4,5 triliun pound per tahun dan angka itu akan terus bertambah. Pembuangan sampah sebanyak itu, akan membocorkan gas rumah kaca berbahaya dan berkontribusi pada perubahan iklim. Di Amerika Serikat contohnya, tempat pembuangan sampah padat adalah sumber emisi metana terbesar ketiga, menurut data terbaru yang tersedia dari Badan Perlindungan Lingkungan. Pada 2019, tempat pembuangan sampah melepaskan 15% emisi metana, yang setara dengan emisi dari lebih dari 21,6 juta mobil penumpang yang dikendarai selama satu tahun (Kaza et al., 2018).

Timbunan Municipal Solid Waste (MSW) per kapita di ASEAN adalah 1,14 kg/kapita/hari. Dalam hal total timbunan MSW tahunan, urutannya adalah sebagai berikut: Indonesia menghasilkan jumlah sampah perkotaan tertinggi dengan 64 juta ton/tahun, diikuti oleh Thailand (26,77 juta ton/tahun), Vietnam (22 juta ton), Filipina (14,66 juta ton), Malaysia (12,84 juta ton), Singapura (7,5 juta ton), Myanmar (0,84 juta ton), dan Laos

menghasilkan jumlah MSW terendah sebesar 0,07 juta ton/tahun. Sebagian besar sampah organik (sekitar atau lebih dari 50%) merupakan fraksi sampah tertinggi di semua negara ASEAN, kecuali Singapura, di mana sampah organik hanya menyumbang 10,5% dari total sampah kota. Aliran limbah lain seperti plastik, kertas, dan logam juga merupakan pemandangan umum di tumpukan sampah. Selain MSW, Limbah Kesehatan, Limbah Elektronik, Limbah Industri, dan Limbah Konstruksi dan Pembongkaran adalah aliran limbah yang muncul di negara-negara ASEAN (UNEP, 2017).

Pengelolaan sampah merupakan isu lokal dengan implikasi global. Karena populasi dunia terus bertambah, begitu pula jumlah sampah yang dihasilkan. Pada tahun 2015, dunia menghasilkan 2 miliar metrik ton limbah padat. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,4 miliar metrik ton pada tahun 2050. Di negara-negara berpenghasilan rendah, jumlah sampah diperkirakan akan meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2050 (Kaza et al., 2018). Dengan meningkatnya timbulan sampah, begitu pula pentingnya memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif. Namun, pemerintah kota dan daerah menghadapi banyak tantangan dalam hal pengelolaan limbah padat mereka dengan benar. Akibatnya, diperkirakan setidaknya 2 miliar orang tinggal di daerah yang kekurangan pengumpulan sampah dan bergantung pada tempat pembuangan sampah yang tidak terkendali (UNEP, 2015; ISWA 2015). Sistem pengelolaan limbah padat yang tidak memadai menghadirkan risiko serius bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan mata pencaharian di banyak kota. Sampah telah menjadi masalah yang cukup

mengganggu dan memberikan resiko bagi kesehatan masyarakat, mencemari lingkungan dan penanganan terhadapnya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. (Pinontoan & Sumampouw, 2019).

Asumsi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan bahwa setiap hari penduduk Indonesia memproduksi 0,8 kilogram sampah per orang atau jika dijumlahkan secara keseluruhan sebanyak 189 ribu ton sampah per hari. Kondisi ini menjadi sebuah permasalahan besar bagi Indonesia. Jumlah timbulan sampah diperkirakan akan terus meningkat karena adanya kebutuhan atau pola konsumsi masyarakat yang juga meningkat. Kota Yogyakarta sebagai wilayah perkotaan yang berkembang pesat dengan beragam daya tarik, pesona dan kenangan sehingga membuat antusiasme orang yang berkunjung bahkan menetap di kota ini cukup tinggi. Dalam satu dasawarsa terakhir peningkatan jumlah penduduk Kota Yogyakarta terlihat linier dari tahun ke tahun. Apabila tren ini berlanjut terus maka pada diestimasikan pada tahun 2035 penduduk Kota Yogyakarta akan lebih dari setengah juta jiwa. Perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang berjalan beriringan di suatu kota meniscayakan dampak yang signifikan terutama pada lingkungan. Sampah sebagai salah satu produk samping aktivitas manusia tentu saja tidak bisa dihindarkan. Sekarang saja timbulan sampah Kota Yogyakarta sudah mencapai lebih dari 360 ton/hari. Jika jumlah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk Kota Yogyakarta maka produksi sampah perkapita mencapai 0,82 kg/hari, yang mana ini melebihi rata – rata nasional Indonesia yaitu 0,7 kg/hari (Bappeda, 2021). Angka

tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui timbulan yang tinggi tersebut merupakan dampak dari aktivitas bisnis dan pariwisata atau dari kegiatan domestik. Namun paling tidak, data ini sudah mampu mendeskripsikan tantangan persampahan di Kota Yogyakarta saat ini maupun di masa mendatang dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung terus meningkat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihatin, (2020), Sampah masih terus menjadi masalah bagi sebagian besar perkotaan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah dari sumbernya membuat pengelolaan sampah belum maksimal. Keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), buruknya sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang kurang higienis, serta belum terpisah antara sampah organik dan anorganik di masyarakat turut menjadi penyebab masalah sampah di perkotaan.

Menindaklanjuti hal tersebut perlu dilakukan pengkajian terhadap solusi atas persoalan tersebut, melihat dari semakin meningkatnya produksi sampah dan terbatasnya lahan yang disediakan untuk menampung sampah. Tentu ini memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang terkait. Solusi atas persoalan sampah di Kota Yogyakarta perlu dirumuskan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilirnya, sehingga diharapkan masalah-masalah yang timbul akibat pengelolaan sampah yang belum sempurna dapat diminimalkan. Masing-masing wilayah baik Kota maupun Kabupaten dan satuan wilayah di bawahnya sampai ke tingkat Kelurahan secara aktif dapat berinisiatif untuk mencari solusi terkait persoalan ini.



Gambar 1. 1 Pengelolaan sampah yang terdiri dari upaya pengurangan di hulu dan penanganannya

Penanganan sampah yang dilakukan terhadap timbulan sampah Kota Yogyakarta saat ini telah mencapai 72,96%, pengurangan sampah mencapai 26,07%, dan ada sisa sampah yang belum terkelola sebesar 0,97% (Bappeda, 2021). Capaian ini masih harus ditingkatkan lagi sesuai dengan target tahun 2025 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di dalam Jakstranas, yaitu 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah. Dua target utama pengelolaan sampah. Dari data pengelolaan sampah Kota Yogyakarta tersebut, masih perlu ditingkatkan dari sisi pengurangan timbulan sampah yang dapat dilakukan dengan pembatasan, daur ulang dan pemakaian ulang sampah pada sumbernya. Disamping besarnya timbulan sampah per hari, Kota Yogyakarta menghadapi kendala terbesar dalam hal pengelolaan sampah yaitu ketergantungan terhadap keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Piyungan dan keterbatasan lahan untuk pengembangan pengelolaan sampah. Masalah besar dapat timbul manakala terjadi permasalahan teknis maupun nonteknis di TPST Regional Piyungan akibat ketergantungan ini. Berakhirnya usia operasional di tahun 2020 adalah

permasalahan teknis TPST Regional Piyungan yang paling mendesak. Sedangkan permasalahan nonteknis yang muncul adalah kerawanan sosial dan pencemaran lingkungan yang tentunya menambah beban pengelolaan akhir sampah. Tantangan pengelolaan sampah di perkotaan tidak hanya berasal dari pertumbuhan penduduk akibat migrasi dan kelahiran, namun juga dari aspek ketersediaan lahan untuk fasilitas pengolahan. Partisipasi masyarakat urban cenderung rendah karena faktor kesibukan keseharian. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat sebuah *masterplan* pengelolaan persampahan guna memberikan arah yang jelas mengenai proyeksi tantangan dan solusi komprehensif yang dapat dilakukan secara optimal untuk mengatasi persoalan sampah.

B. Fokus Penelitian

Pokok dalam penelitian ini adalah implementasi *Masterplan* Pengelolaan Persampahan, maka penelitian ini berfokus kepada:

1. Tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta dalam menerapkan *Masterplan* Pengelolaan Persampahan.
2. Potensi menyelesaikan persoalan sampah dengan melihat dari sisi *governing* pemerintah dalam mensukseskan implementasi *Masterplan* tersebut di Kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Responsibilitas Bappeda terhadap *Masterplan* Pengelolaan Persampahan di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana proses penerapan *Masterplan* Pengelolaan Persampahan di Kota Yogyakarta dan hambatan apa saja yang dihadapi Bappeda dalam menerapkan *Masterplan* Pengelolaan Persampahan di Kota Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab Bappeda Kota Yogyakarta dalam perencanaan pembangunan terkait *Masterplan* Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan proses penerapan *Masterplan* Pengelolaan Persampahan di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bappeda dalam penerapan *Masterplan* Pengelolaan Persampahan di Kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama dalam menggunakan analisis terhadap perencanaan pengelolaan persampahan serta

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian dengan tema yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan persampahan khususnya bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penyelesaian permasalahan persampahan di Kota Yogyakarta kedepannya.

F. Kajian Konseptual

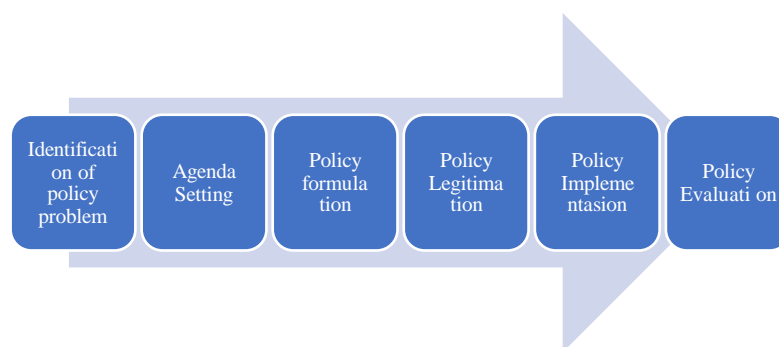
1. Kebijakan

a) Pengertian Kebijakan

menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy, 2002).

b) Teori Proses Kebijakan

Proses Kebijakan menurut Tomas R. Dye (2013) sebagai berikut:



c) **Teori Implementasi Kebijakan**

Teori George C. Edward Edward III dalam Subarsono, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono, 2012).

2. *Masterplan*

Masterplan merupakan rencana induk pedoman dalam pembangunan dan pengembangan suatu tempat / daerah yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang untuk kegiatan-kegiatan penunjang. *Masterplan* adalah sketsa tata ruang utama yang berisi tentang letak dan gambaran besar sebuah kawasan proyek infrastruktur yang akan dibangun. Bukan hanya itu, dalam *masterplan* juga terlihat lokasi fasilitas umum dan sosial yang nantinya akan dapat digunakan bersama saat konstruksi sudah selesai dibuat. Pada umumnya, *masterplan* adalah dokumen yang berbentuk kertas lembaran. Namun kini tak jarang ada yang membuat contoh *masterplan* hanya dalam bentuk soft file dalam perangkat digital saja.

Sejak tahun 2001, *masterplan* telah diwajibkan untuk semua kota yang berpenduduk lebih dari 20 ribu jiwa. *Masterplan* membantu mengatur pertumbuhan kota, selalu mempertimbangkan kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. *Masterplan* berfungsi menjadi dasar yang memandu pembuatan kebijakan publik di kota yang terkait

dengan pembangunan dan pertumbuhan kota. Dokumen tersebut membantu pemerintah membuat keputusan yang tepat untuk memastikan perencanaan kota yang terbaik. *Masterplan* tersebut mendefinisikan secara rinci proyek mana yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan warga dan memberikan peningkatan kualitas hidup penduduk.

Peran *Masterplan* dalam Statuta Kota, Menurut undang-undang, fungsi masterplan adalah: 1) Memastikan bahwa investasi dilakukan untuk keberlanjutan kota; 2) Memungkinkan dan mendorong partisipasi warga negara dan asosiasi dalam pilihan kebijakan publik; 3) Merangsang kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjamin manfaat bagi kota; sebab rencana pembangunan kota harus mengintegrasikan kebutuhan sektor perkotaan dan pedesaan, dan melestarikan dan melindungi lingkungan, mengatur daerah-daerah yang ditempati oleh warga berpenghasilan rendah.

Masterplan disiapkan oleh tim yang terdiri dari beberapa profesional, dipimpin oleh seorang arsitek yang bertanggung jawab. Agar *masterplan* disetujui dan dapat dilaksanakan, di kota harus memenuhi langkah-langkah berikut: 1) Analisis masalah dan karakteristik kota yang membutuhkan langkah-langkah perbaikan atau investasi. 2) Identifikasi poin-poin fundamental dan evaluasi data detail kebijakan yang akan dikembangkan. 3) Pembuatan langkah-langkah yang akan diterapkan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. 4) Penyusunan rencana sesuai dengan hukum. Dan 5) Diskusi, pemungutan suara, dan persetujuan

Rencana oleh para anggota dewan. Pemungutan suara dan persetujuan *masterplan* harus dilakukan di Dewan Kota. Agar disetujui, Rencana tersebut harus menerima 2/3 suara dari para anggota dewan. Setelah *masterplan* disetujui, digunakan sebagai panduan untuk elaborasi proyek dan kebijakan publik yang menentukan secara rinci bagaimana langkah-langkah akan diadopsi dan dipraktikkan. Semua proyek yang dibuat harus mematuhi langkah-langkah dasar yang ditentukan dalam *masterplan*.

Kebijakan yang harus dipertimbangkan, menurut Konstitusi Federal, *masterplan* tersebut harus berisi definisi tindakan yang diperlukan untuk organisasi kota untuk menjamin fungsi sosial properti perkotaan (langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk). Beberapa langkah yang harus dimasukkan dalam *masterplan* adalah: 1) Peruntukan tanah di kota; 2) Kebijakan untuk meningkatkan mobilitas perkotaan; 3) Kondisi sirkulasi dan aksesibilitas baru; 4) Penggunaan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan tanah dan bangunan kosong; 5) Perbaikan sanitasi dasar; 6) Proyek pertumbuhan dan modernisasi angkutan umum; 6) Aturan dan pemantauan penggunaan lahan yang bertanggung jawab; 7) Melaksanakan pekerjaan lain yang diperlukan. Kebutuhan yang ditetapkan dalam *masterplan* juga harus memperhitungkan anggaran kota dan harus dimasukkan dalam prakiraan anggaran, seperti rencana multi-tahunan dan undang-undang anggaran.

Tinjauan *Masterplan*, ia harus ditinjau setidaknya setiap sepuluh tahun untuk memverifikasi bahwa kebutuhan terpenuhi. Selain itu, dalam

tinjauan tersebut tindakan atau kebutuhan baru yang mungkin muncul untuk kotamadya dapat dimasukkan. Semua perubahan yang dibuat pada *masterplan* harus menjalani prosedur yang sama yang diperlukan untuk persiapannya. Apa yang terjadi jika *Masterplan* tidak terpenuhi, menurut Statuta Kota, mereka yang bertanggung jawab atas ketidakpatuhan terhadap hukum dapat dituntut karena ketidakjujuran administratif. Baik walikota maupun anggota dewan bertanggung jawab atas pelaksanaan *masterplan* tersebut dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas ketidakpatuhannya.

3. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kata benda (nomina) yang memiliki lima makna, yaitu kewajiban, tanggungjawab, penanggung, pertanggung dan pertanggung jawaban. Menurut Kamus Bahasa Inggris terjemahan Indonesia arti responsibilitas adalah kewajiban atau tanggung jawab.

Responsibilitas adalah kemampuan subjek untuk menanggapi komitmen dalam bentuk apa pun, serta skenario yang menuntut pemenuhan tugas atau kinerjanya dalam istilah etika, moral dan sipil (Sinaga, 2021). Responsibilitas atau tanggung jawab adalah sikap yang sangat dihargai dalam masyarakat, karena nilai ini dikaitkan dengan kepercayaan, solidaritas, empati, kerja produktif, kesempurnaan, dan yang terpenting, kebaikan bersama. Ada 13 indikator dari responsibilitas, yaitu (Admin, 2021) :

a) Tepat Waktu

Tepat waktu adalah salah satu tanda tanggung jawab yang paling ikonik. Ini menyiratkan, di satu sisi, bahwa orang tersebut mampu mengatur waktu mereka dengan cara yang menguntungkan. Di sisi lain, ini menyiratkan bahwa Anda menghormati waktu orang lain dan, oleh karena itu, menghormati martabat pribadi orang lain. Selain itu, ketepatan waktu menunjukkan niat baik. Prinsip ini dapat diperluas ke pengiriman tugas dan kewajiban tepat waktu yang diperlukan dalam studi atau di tempat kerja.

b) Pencegahan dan Persiapan.

Bersiap untuk situasi apa pun adalah tanda responsibilitas yang jelas. Ketika seseorang bertanggung jawab, mereka mengantisipasi skenario yang harus mereka hadapi dan mempersiapkannya dengan cara yang sesuai, dengan memperoleh alat-alat dasar, apakah mereka intelektual atau sebaliknya.

c) Ketekunan

Ketekunan adalah kualitas bertindak segera setelah kebutuhan muncul, yang memungkinkan penyelesaian masalah di satu sisi, dan mencegahnya menjadi lebih buruk di sisi lain. Faktanya, prinsip melawan penundaan, yang terdiri dari menunda tanggung jawab hingga saat terakhir.

d) Komitmen

Orang yang bertanggung jawab berkomitmen dan terlibat dengan aktivitas yang dia lakukan. Komitmen diterjemahkan ke dalam sikap kepedulian, komitmen dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan tugas, serta dalam perlakuan solidaritas dan hormat dengan anggota tim lainnya.

e) Proaktif

Proaktif dipahami sebagai sikap mengambil inisiatif yang kreatif dan sehat untuk memecahkan masalah tertentu atau memperbaiki lingkungan terdekat, baik itu keluarga, sekolah atau pekerjaan. Sikap ini memungkinkan orang tersebut dengan cepat mengendalikan situasi yang pada akhirnya dapat menjadi skenario konflik, meminimalkan atau sekadar menghindari kerusakan.

f) Keunggulan dalam pemenuhan kewajiban.

Dalam kehidupan sipil, tanggung jawab harus memenuhi kewajiban mereka dengan niat baik dan melakukannya dengan keunggulan, itulah sebabnya mereka unggul dalam kinerja tugas mereka. Orang dengan tanggung jawab yang tinggi tidak hanya sekedar memenuhi kewajibannya, karena ini dilakukan oleh siapapun yang ditekan oleh otoritas. Orang yang bertanggung jawab memberikan yang terbaik dalam memenuhi kewajibannya, yaitu berusaha untuk mencapai pekerjaan dengan kualitas setinggi mungkin, yang memenuhi kebutuhan lingkungan dan bahkan melebihi mereka.

g) Katakan tidak jika tidak perlu.

Tampaknya membingungkan, tetapi mengatakan ya untuk proposal atau permintaan apa pun, terlepas dari waktu yang tersedia atau kemampuan kita, adalah tidak bertanggung jawab. Bagian dari responsibilitas adalah berani mengatakan tidak ketika kita melihat bahwa tidak ada syarat untuk menjamin kinerja yang baik. Orang yang bertanggung jawab harus mengevaluasi apakah dia benar-benar dapat memenuhi komitmen baru, apakah itu diminta atau muncul dari motivasinya sendiri. Jika tidak, hal itu dapat berdampak negatif pada perkembangan proyek dan akibatnya kehilangan reputasi baik dan dapat merugikan di masa depan.

h) Penerimaan kesalahan dan konsekuensinya.

Responsibilitas tidak sama dengan menjadi sempurna. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab dapat mengenali kesalahannya dan segera mengambil tindakan korektif. Ini berarti bahwa menerima kesalahan dan menanggung akibatnya, apa pun jenisnya, adalah ciri kepribadian yang bertanggung jawab. Menyalahkan orang lain atau keadaan karena gagal melaksanakan tugas jelas merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Orang dengan responsibilitas yang baik tidak menyalahkan orang lain, karena mereka memahami bahwa ini tidak membenarkan tindakan mereka dan tidak memungkinkan untuk menemukan solusi atas masalah yang ditimbulkan. Dengan demikian,

siapa pun yang bertanggung jawab ikut serta dalam pemecahan masalah yang bermula.

i) Peduli lingkungan.

Mencari kebaikan bersama adalah bagian dari tanggung jawab. Oleh karena itu, kepedulian terhadap Seseorang yang memahami bahwa lingkungan harus dijaga, karena ia telah terlebih dahulu memahami bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh tindakan manusia dan oleh karena itu menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi lingkungan demi kebaikan bersama. Dengan demikian, orang yang bertanggung jawab menempatkan sampah di tempat-tempat yang ditentukan untuknya, mendaur ulang, menghemat air dan energi, memilih untuk konsumsi yang bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kegiatan ekologis dan meningkatkan kesadaran warga dalam hal ini.

j) Partisipasi warga.

Tanggung jawab sebagai nilai sosial diekspresikan dalam partisipasi warga negara. Orang yang bertanggung jawab berpartisipasi, dalam satu atau lain cara, dalam kegiatan masyarakat dan kemasyarakatan, sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan ketersediaan mereka. Misalnya, berpartisipasi dalam pertemuan pembahasan *masterplan*, pertemuan evaluasi, diskusi dengan komisi anggota DPRD, dll.

k) Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah.

Orang yang bertanggung jawab memastikan pemeliharaan ketertiban dan kebersihan di dalam kantor , semua pegawai bertanggung jawab berpartisipasi dalam kegiatan kantor membantu memelihara lingkungan yang sehat dan saling menghormati. Kantor yang sehat, bersih dan rapi merupakan pertanda bahwa pegawainya bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, bersikap proaktif, rajin, siap menghadapi skenario apapun.

l) Tagihan per hari.

Menyampaikan laporan secara rutin adalah sikap bertanggungjawab yang baik, berusaha supaya tidak ada tagihan laporan. Kecuali keterlambatan laporan karena sistem yang menghambat.

m) Bantu orang lain untuk lebih bertanggung jawab.

Responsibilitas tingkat terakhir dengan demikian membantu orang lain agar lebih bertanggung jawab. Ini menyiratkan membantu dalam transmisi nilai untuk bertindak secara sadar di lingkungan sosial. Orang yang bertanggung jawab berkomitmen untuk melatih orang lain dan membimbing staf dalam komitmen tanggung jawab kantor, pekerjaan, lingkungan dan sipil. Orang yang bertanggung jawab menghasilkan kepercayaan di sekelilingnya, yang memungkinkan dilakukannya semua jenis proyek yang menghasilkan kebaikan semua pihak.

4. Persampahan

a) Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atas volumenya memerlukan pengelolaan khusus (Undang - Undang RI, 2008).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No 81, 2012, Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaikbaiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi (Azwar, 1996). Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Suryani, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, terlihat bahwa sampah adalah materi/sisa bahan (baik oleh manusia maupun alam)

yang tidak digunakan atau tidak mempunyai nilai, yang dapat membahayakan fungsi lingkungan.

b) Sumber-Sumber sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih, (2008), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya.
- 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti 9 pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.
- 3) Sampah dari sarana pelayanan sampah yang dimaksud di sini misalnya sampah dari tempat hiburan umum, pantai, mesjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

- 4) Sampah dari industri dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, sisa bahan bangunan.
- 5) Sampah pertanian sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

c) Jenis-Jenis Sampah

Menurut Gilbert dkk. dalam Artiningsih, (2008), berdasarkan asalnya sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sampah Organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting.
- 2) Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik

dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*unbiodegradable*). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng.

d) Bentuk Sampah

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi (Shobri, 2014):

- 1) *Biodegradable* adalah sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik *aerob* atau *anaerob*, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.
- 2) *Non-biodegradable* adalah sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi menjadi:
- 3) *Recyclable*: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.

4) *Non-recyclable*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.

e) Kualitas Sampah

Menurut Hadiwiyoto (1983), bahwa kuantitas dan kualitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi produksi sampah, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula produksi sampahnya, hal ini berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.
- 2) Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi sosial ekonomi masyarakat maka semakin banyak sampah diproduksi yang biasanya bersifat sampah tidak dapat membusuk dan hal ini tergantung bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku dan juga kesadaran masyarakat.
- 3) Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

f) Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Undang - Undang RI, 2008).

Terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu:

- 1) Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (*reduce*) menggunakan ulang (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*).
- 2) Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari:
 - a) Pemilahan: dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
 - b) Pengumpulan: dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c) Pengangkutan: dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
 - d) Pengolahan: dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
 - e) Pemrosesan akhir sampah: dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Suwerda, (2012) mengemukakan beberapa dampak apabila sampah tidak dikelola dengan baik sebagai berikut:

- 1) Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme

patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya.

- 2) Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
- 3) Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang dikeluarkan dapat meresap ke tanah, dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah, dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.
- 4) Pembuangan sampah ke sungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga dapat memicu terjadinya banjir (Kahfi, 2017).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Reni Masrida (2017)	Kajian Timbulan dan Komposisi Sampah Sebagai Dasar Pengelolaan Sampah di Kampus II Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Metodologi penelitian yang dilakukan adalah pengukuran langsung di lapangan dengan mengacu pada SNI 19-3964-1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah	Hasil sampling diperoleh bahwa volume sumber sampah rerata 1,68 m ³ /hari (123,43 kg/hari). Secara umum komposisi persampahan UBJ yaitu 58,53% organik dan 41,47% an organik. Untuk sampah an organik, komposisi sampah yang dianggap berpotensi secara ekonomis terdiri dari 3 (tiga) jenis sampah dengan prosentase > 10% untuk bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar sintetis dan bahan kertas daur ulang. Bahan tersebut adalah Botol plastik 14,33%, Kertas 15,00% dan plastik lembaran 13,37% (jumlah sampah yang bisa dimanfaatkan 42,7%). Usulan tata kelola adalah dengan pemberdayaan unit kegiatan mahasiswa dalam pemilahan sampah yang bernilai ekonomis. Sedangkan untuk usulan teknis diharapkan bisa menampah space untuk area penerimaan, timbunan dan area pemilahan seluas ± 55 meter persegi.
2	Fadhilah et al., (2011)	Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan	menggunakan metode deskriptif dan mengambil	Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNDIP belum mengelola sampah dengan tepat. Beberapa solusi pengelolaan sampah di JAFT

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro	studi kasus di kampus Jurusan Arsitektur UNDIP	merujuk ke pengelolaan sampah 3P (penggunaan kembali, pengurangan, dan pendaurulangan) dengan pengaplikasian yaitu pemilahan sampah dengan pembedaan tempat sampah, pembuatan composting, pendaurulangan sampah kertas, mengembalikan tugas mahasiswa agar tidak menumpuk dan bias digunakan kembali oleh mahasiswa tersebut.
3	Fitria et al., (2016)	Studi Timbulan, Komposisi dan Karakteristik Dalam Perencanaan Pengelolaan Sampah Universitas Diponegoro Studi Kasus : Fakultas Psikologi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat	Metodologi penelitian yang dilakukan adalah pengukuran langsung di lapangan dengan mengacu pada SNI 19-3964- 1994	Proyeksi kondisi timbulan sampah pada tahun 2035 Fakultas Psikologi sebesar 34,534 kg/hari atau 456,798 liter/hari. Perbedaan kondisi timbunan sampah pada saat musim hujan maupun musim kemarau, yang berpengaruh baik pada proses pengumpulan hingga pengangkutan ke TPST UNDIP. Pemandahan dan pengangkutan sampah dilakukan sesegera mungkin karena sisa makanan yang tinggi dapat cepat membusuk dan menimbulkan bau. Perlunya kerjasama segenap civitas akademika Fakultas Psikologi dan FKM dalam membuang sampah. Biaya operasional yang tinggi dipengaruhi oleh penggunaan trash bag.
4	Zhang et al., (2017)	College Students' Municipal Solid Waste Source	Studi ini melakukan survei intersepsi tatap muka di 10 kampus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95% responden setuju diperlukannya pemisahan sampah dari sumbernya, sedangkan hanya 20% yang

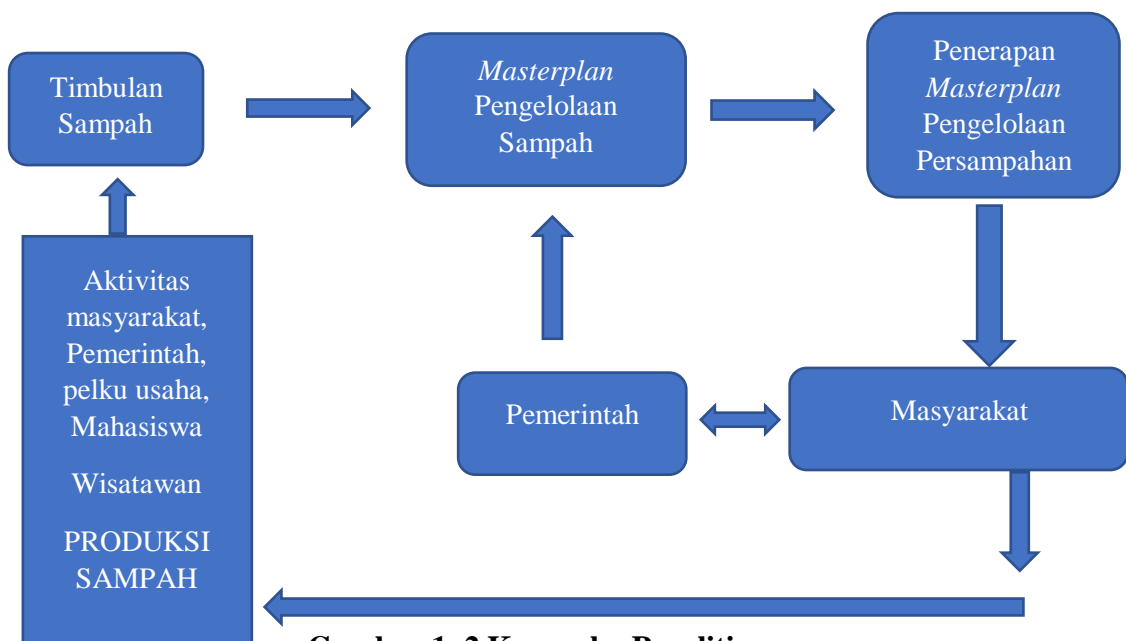
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		Separation Behavior and Its Influential Factors : A Case Study in Beijing, China	universitas di Beijing, untuk mengumpulkan informasi langsung tentang perilaku pemisahan sumber limbah siswa dan faktor-faktornya yang berpengaruh	setuju memisahkan dua atau tiga jenis sampah dari sumbernya. Untuk daur ulang, sampah berbahaya dan sampah makanan di dapatkan 39%, 25%, dan 16%. Dengan pengujian 5 hipotesis untuk mengidentifikasi karakteristik yang cenderung berpartisipasi aktif dalam pemisahan sumber sampah. Mahasiswi memisahkan lebih banyak sampah dari sumber dari pada mahasiswa. Kesadaran mahasiswa terhadap pencemaran lingkungan saat ini disebabkan oleh MSW dan upaya nyata mereka untuk perlindungan lingkungan memiliki hubungan positif dengan perilaku.
5	Adeniran et al., (2017)	Solid Waste Generation and Characterization in The University of Lagos A Sustainable Waste Management	dilakukan dengan menggunakan metode ASTM D5231-92 dan Resource Conservation Reservation Authority RCRA Waste Sampling Draft Technical Guidance	Diperkirakan sampah harian kampus universitas lagos akoka sekitar 32,2 ton dengan produk polythene merupakan bagian terbesar dari limbah 34%. Limbah universitas memiliki potensi daur ulang yang tinggi (75%). organik yang dihasilkan bisa dikelola melalui formasi komposit pada integrasi dengan sistem pengelolaan limbah. kebijakan strategis dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengurangi sumber dan memperbaiki daur ulang limbah. Karakterisasi limbah sebagaimana disorot dalam makalah ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola pembangunan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				limbah di kampus universitas dan bagaimana seharusnya merangsang dasar keputusan yang lebih baik mengenai strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah di kampus

Sumber: data sekunder diolah 2022

H. Kerangka Pikir Peneliti

Dalam Penelitian ini kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Rukajat, 2018).

- a) Penelitian eksploratif menurut Suharsimi dalam Arikunto (2010) adalah penelitian yang berusaha menggali tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu. Penelitian yang bersifat eksploratif juga berusaha menggali pengetahuan baru untuk mengetahui suatu permasalahan yang sedang atau dapat terjadi. Penelitian ini berusaha untuk menggali informasi melukiskan, menggambarkan atau mengetahui sesuatu.
- b) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berakar pada latar ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai instrumen pengumpulan data, mengandalkan data secara induktif, mengarah pada penemuan teori, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk keabsahan data, rancangan bersifat sementara dan kesimpulan penelitian disepakati dan subjek yang diteliti (Moleong, 2008).

Mengacu kepada penjelasan di atas penelitaian ini melakukan pengamatan secara langsung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melihat sebab akibat yang terjadi dan mendiskripsikan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, memilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta yang bermula dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki peran utama dalam mengkoordinasi perencanaan pengelolaan persampahan di kota Yogyakarta. Karena satu dan lain hal maka lokasi penelitian bertambah ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap kegiatan persampahan, Dinas Perdagangan sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah pasar, dan Dinas Kebudayaan bagian UPT Cagar Budaya yang mengelola persampahan di daerah Tugu, Malioboro, Kraton (Gumaton) kota Yogyakarta.

Waktu penelitian, secara formal penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai bulan Mei sampai Juli 2022. Secara non formal sesungguhnya penelitian ini sudah dimulai awal tahun 2021. Hal ini dapat dibuktikan dari keterlibatan peneliti dalam mengikuti pembahasan kajian *masterplan* pengelolaan persampahan di Kota Yogyakarta dan meneliti melakukan penelitian kecil bersama mahasiswa yang magang di kantor kelurahan, kantor dimana kantor kelurahan sebagai tempat peneliti bekerja. Tema penelitian kecil tentang ide pengurangan sampah melalui aktivitas

mahasiswa berbasis *masterplan* pengelolaan persampahan. Hasil penelitian kecil menjadi bahan pembuat jurnal, dan jurnal sudah disubmit ke Journal of Innovation Research and Knowledge terbit pada volume 2 Nomor 2 juli 2022.

3. Unit Analisis Data

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Subjek dalam penelitian ini adalah *Masterplan* pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta.

b. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, (2010) mendefinisikan objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Program *Masterplan* Pengelolaan persampahan Kota Yogyakarta.

c. Informan

Informan dalam Moleong (2008) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini informan tersebut adalah Kepala Bappeda Kota Yogyakarta dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Kota Yogyakarta, Dinas Perdagangan bagian persampahan, dan Dinas Kebudayaan bagian UPT Cagar Budaya.

Tabel 1. 2 Daftar informan

No	Nama	Jabatan	Instansi/OPD
1	Maria Herdwi Widyarningsih, S.T.	Sub Koordinator kelompok substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
2	Ahmad Haryoko, SE., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
3	Kelik Novidwyanto, SE.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar	Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
4	Ardiyan Putra Indrayana, SE.	Kasi Pemeliharaan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
5	Iwan Agustian, S.IP	Ketua LPMK	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan

Sumber : Data primer diolah 2022

d. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang peneliti pakai adalah snowball sampling. Menurut Nurdiani (2014) snowball sampling adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud

untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi.

Dalam penelitian informan kunci adalah ditetapkan kepada Kepala Bappeda Kota Yogyakarta dan kemudian di arahkan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta sebagai pelaksanaan secara teknis, selanjutnya peneliti mengikuti petunjuk informan kunci untuk mendalami tema ke kepala bidang masing-masing, informasi diperluas sesuai rekomendasi dari Bappeda dan DLH ke Dinas Perdagangan dan Dinas Kebudayaan (UPT Cagar Budaya).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution dalam Sugiyono menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta mengenai dunia kenyataan diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2010).

Berdasarkan definisi diatas maka observasi merupakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di

lapangan, yaitu : 1) Keadaan umum Kota Yogyakarta; 2) Keadaan Timbulan Sampah di Kota Yogyakarta; dan 3) Sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya *masterplan* pengelolaan persampahan. Observasi dilaksanakan pada di bulan mei dan bulan juni 2022.

b. Wawancara Mendalam/ *In Depth Interview*

Wawancara mendalam/ *In Depth Interview* menurut Esterberg dalam Sugiyono adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang terstruktur, artinya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara dilaksanakan pada akhir bulan Juni hingga pertengahan bulan Juli dengan beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan persampahan kota Yogyakarta, berlokasi di masing masing kantor OPD terkait, dengan Tema *Masterplan* Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Secara sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian (Sugiyono, 2010). Alat

bantu yang digunakan pada saat dokumentasi adalah kamera. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan. Dokumen yang berhasil dikumpulkan sebagai data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Laporan Akhir *Masterplan* Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta, disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Fakultas Teknik UGM tahun 2021.
- 2) Kajian Akhir Kajian Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Untuk meningkatkan Daya saing DiTengah Persaingan Pasar Modern, Dinas perindustrian dan Perdagangan DIY tahun 2022.
- 3) Lima (5) penelitian terdahulu tentang pengelolaan persampahan di berbagai daaerah disajikan pada tabel 2 dihalaman 36.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5) Peraturan Daerah

d. Teknik Analisis Data

Analisis data di lapangan model Miles and Huberman (Sugiyono, 2010), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

- 1) Data *identification* atau identifikasi data, setelah data terkumpul peneliti melakukan identifikasi antara data primer dengan data sekunder melalui analisis konten.
- 2) Data *reduction* atau reduksi data, dari hasil analisis konten data direduksi atau dipilah sesuai dengan tujuan penelitian focus penelitian data yang tidak masuk kedalam focus penelitian dibuang atau dihapus. Jadi reduksi data sebagai tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan data yang diperlukan menuju tahap pengambilan kesimpulan.
- 3) Data *display* atau penyajian data, penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.

4) *Conclusion drawing/ verification* atau penarikan kesimpulan, adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Dalam penelitian ini kesimpulan disajikan dibagian akhir atau penutup, agar pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

5) Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data peneliti melakukan keabsahan data, agar penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang benar.

Keabsahan data dilakukan dua tahap, sebagai berikut:

a. Uji derajat kepercayaan

Uji derajat kepercayaan atau *credibility* dilakukan dengan proses pembuktian kebenaran data bahwa peneliti tidak dianggap sebagai orang yang mengganggu. Sebab antara peneliti dan subyek penelitian adalah sama-sama PNS di Kota Yogyakarta yang saling bekerjasama dan sering kerja satu tim, serta diskusi menyelesaikan permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini derajat kepercayaan dilakukan dengan Teknik triangulasi metode, triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi hasil,

b. Uji kepastian

Uji kepastian atau *conformability*, yaitu obyektivitas bahwa hasil penelitian dapat diterima karena berpusat pada data bukan pada

orang, sehingga peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan dengan judul “Ide Pengurangan Sampah Melalui Aktivitas Mahasiswa Di Kota Yogyakarta Berbasis *Master Plan* Pengelolaan Persampahan Tahun 2022-2031”, hasil studi pendahuluan telah terbit di *Journal of Innovation Research And Knowledge* Volume 2, nomor 2 edisi Juli 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Wilayah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" – 110°28'53" Bujur Timur dan 07°15'24" – 07°49'26" Lintang Selatan dengan luas kawasan administrasi 3.280 hektar menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki lahan yang cukup datar dengan ketinggian rata-rata yaitu 114 mdpl (meter di atas permukaan laut). Kota Yogyakarta memiliki tiga sungai utama yang mengalir dari utara ke selatan yaitu (dari sisi timur kesisi barat) Sungai Gajah Wong, Sungai Code, dan Sungai Winongo, menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

Secara administratif Kota Yogyakarta memiliki 14 kemantren (kecamatan) dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara: Kabupaten Sleman

Timur: Kabupaten Bantul dan Sleman

Selatan: Kabupaten Bantul

Barat: Kabupaten Bantul dan Sleman

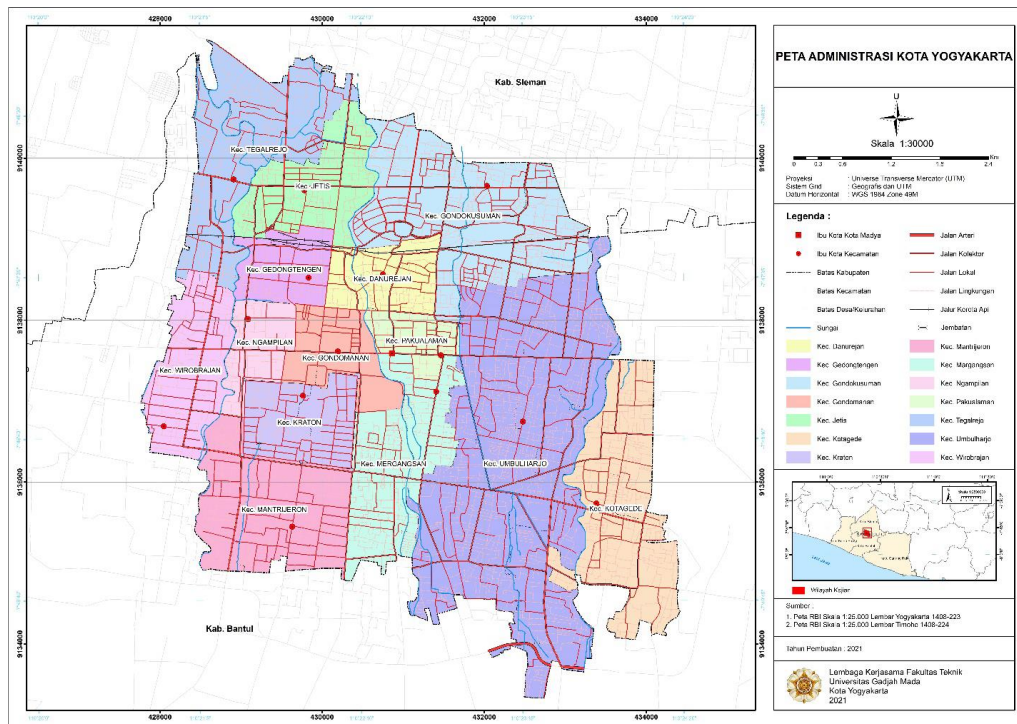
Luasan lahan yang terbangun di masing-masing Kemantren dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Nama dan Luas Wilayah per Kemantren serta jumlah Kelurahan

Nama Kemantren	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah					
		Administrasi			Terbangun		
		Km ²	(Ha)	% terhadap Total Luas Administrasi Kota Yogyakarta	Km ²	(Ha)	% terhadap Total Luas Administrasi Kemantren
Mantrijeron	3	2,61	261	8,0	2,38	298	91,19
Kraton	3	1,40	140	4,3	1,15	115	82,14
Mergangsan	3	2,31	231	7,1	1,96	196	85,00
Umbulharjo	7	8,12	812	25	6,22	622	78,00
Kotagede	3	3,07	307	9,4	2,36	236	77,00
Gondokusuman	5	3,98	398	12,3	3,20	320	80,40
Danurejan	3	1,10	110	3,4	0,89	89	80,91
Pakualaman	2	0,63	063	1,9	0,57	57	90,48
Gondomanan	2	1,12	112	3,4	1,01	101	90,27
Ngampilan	2	0,82	082	2,5	0,64	64	78,05
Wirobrajan	3	1,76	176	5,4	1,50	150	85,23
Gedongtengen	2	0,96	096	3	0,65	65	67,71
Jetis	3	1,70	170	5,2	1,59	159	93,53
Tegalrejo	4	2,90	290	9,0	2,74	274	94,48
Total		32,50	3.250	100	28,26	2.686	

Sumber: data diolah 2022 (BPS Kota Yogyakarta 2021)

Penggunaan lahan paling banyak untuk permukiman yaitu sebesar 64,6%, jasa 8,6%, perusahaan 9,3%, industri 1,6%, pertanian 3,4%, nonproduktif 0,6%, dan lain-lain 11,9%. Sementara itu, sebaran wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 2.1. berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa Kota Yogyakarta dikelilingi oleh Kabupaten di sekitarnya dengan luas wilayah yang cukup kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya. Selain itu, kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di perbatasan Kota Yogyakarta tidak dapat dilakukan berdasarkan wilayah administratif, sehingga terdapat kebauran antara Kemantren Kota Yogyakarta dengan Kapanewon di Kabupaten Sleman dan Bantul.



Sumber: Masterplan, 2021

Gambar 2. 1 Peta administrasi kota Yogyakarta

1. Kondisi Fisik

a. Batas Administrasi

Secara administratif, Kota Yogyakarta dari 14 Kemantren dan 45 Kelurahan, Sebelah Utara: Kabupaten Sleman (Kapanewon Mlati dan Kapanewon Depok), Sebelah Timur: Kabupaten Bantul (Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok, dan Kapanewon Banguntapan), Sebelah Selatan: Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan), Sebelah Barat: Kabupaten Bantul (Kabupaten Sleman, Kapanewon Kasihan)

Tabel 2. 2 Data Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Kemantren	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			Kelurahan	Penduduk (Orang)
1	Tegalrejo	2,91	4	37.416
2	Jetis	1,72	3	27.350
3	Gondokusuman	3,97	5	43.096
4	Danurejan	1,10	3	21.357
5	Gedongtengen	0,96	2	19.844
6	Ngampilan	0,82	2	18.453
7	Wirobrajan	1,76	3	28.064
8	Mantrijeron	2,61	3	35.608
9	Kraton	1,40	3	21.890
10	Gondomanan	1,12	2	14.975
11	Pakualaman	0,63	2	10.750
12	Mergangsan	2,31	3	31.971
13	Umbulharjo	8,12	7	70.818
14	Kotagede	3,07	3	34.632
Total		32,50	45	416,224

Sumber: Data kependudukan jogja smart service dan BPS kota Yogyakarta diolah 2022

Kota Yogyakarta dikelilingi oleh Kabupaten di sekitarnya dengan luas wilayah yang cukup kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya. Selain itu, kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di perbatasan Kota Yogyakarta tidak dapat dilakukan berdasarkan wilayah administratif, sehingga terdapat kebauran antara Kemantren Kota Yogyakarta dengan Kapanewon di Kabupaten Sleman dan Bantul.

b. Letak Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur (BT) dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan (LS), dengan luas sekitar 32,5 km² atau 1,02 % dari luas wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY). Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km.

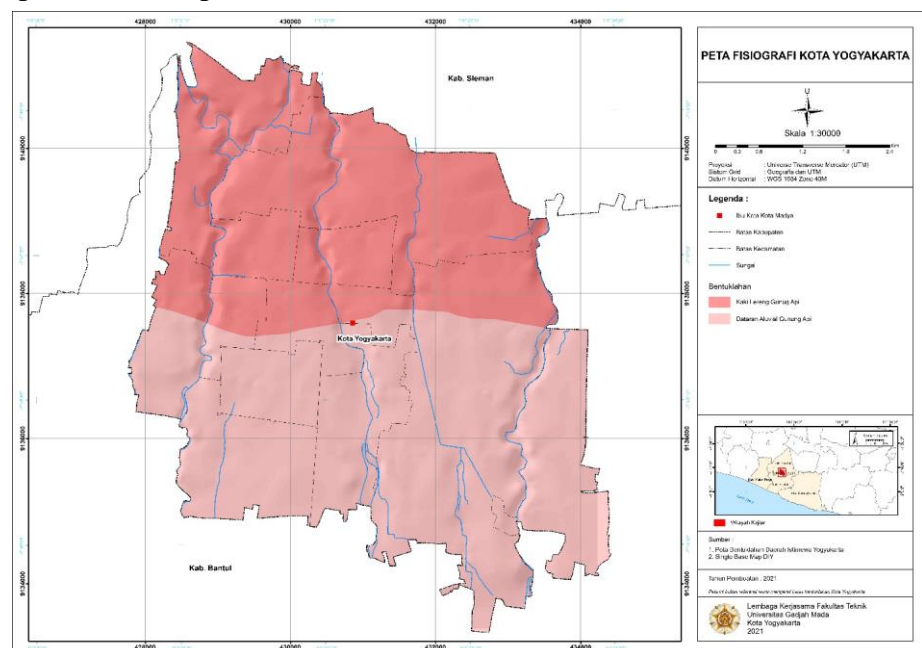
Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 4 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian Timur kota, Sungai Belik Manunggal, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian Barat kota.

1) Hidrologi

Aspek hidrologi dapat diamati melalui sebaran sungai dan jaringan drainase di Kota Yogyakarta. Terkait dengan sungai, Kota Yogyakarta dilewati oleh 3 (tiga) sungai utama yang mengalir dari utara ke selatan. Urutan sungai dari arah timur ke barat meliputi Sungai Gajahwong, Sungai Code, dan Sungai Winongo. Sementara itu terdapat sungai-sungai kecil maupun saluran-saluran berupa parit/selokan kecil yang terhubung ke sungai-sungai utama tersebut. Terkait dengan jaringan drainase, hampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta telah terpasang jaringan drainase pada tiap ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal. Sementara itu, kebanyakan jalan lingkungan memiliki parit/selokan kecil untuk menampung air genangan dari jalan.

2) Fisiografi

Aspek fisiografi dapat diamati melalui bentuk lahan Kota Yogyakarta. Jenis bentuk lahan di Kota Yogyakarta, Bagian wilayah utara Kota Yogyakarta terbentuk menjadi bentuk lahan berupa kaki lereng gunung api. Bentuk lahan ini memiliki karakter datar, terbentuk dari pengendapan material oleh proses fluvial, kemiringan lereng dari agak landai sampai landai, dan material permukaan didominasi oleh kerikil dan pasir kasar. Sementara bagian wilayah selatan Kota Yogyakarta terbentuk menjadi bentuk lahan dataran aluvial gunung api. Bentuk lahan ini memiliki karakter satuan bentuk lahan dengan topografi datar, berbentuk dari proses fluvial, proses pengendapan intensif, material utamanya berupa pasir sedang dan halus, serta pemanfaatan lahan ideal untuk pertanian dan permukiman.



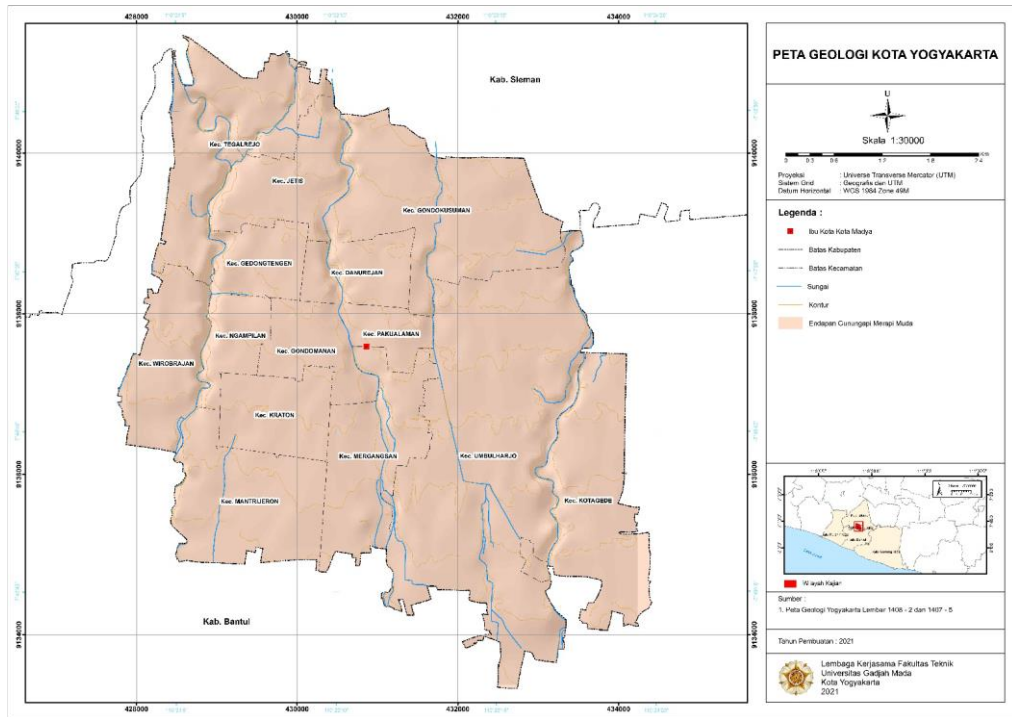
Gambar 2. 2 Bentuk lahan Kota Yogyakarta

Sumber: Masterplan, 2021

3) Geologi

Seluruh dataran wilayah Kota Yogyakarta terbentuk dari endapan gunung api merapi muda. Endapan tersebut terdiri dari leleran breksi lahar dari Gunung Merapi. Breksi lahar umumnya melapuk sedang, berwarna coklat tua, komponen tufa, dan batuan agak segar yang berukuran pasir kasar hingga kerakal yang menyudut sampai membulat tanggung, serta agak padu. Formasi ini di permukaan didominasi oleh breksi lahar yang secara umum mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi. Pasir tufa endapan ini terdiri dari pasir tufa, abu, aglomerat dan leleran lava tak terpisahkan.

Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawah lereng Gunung Merapi. Sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Sedangkan di kawasan Kemantren Umbulharjo dan sekitarnya memiliki jenis tanah lempung kepasiran (*sandy clay*) dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua. Karakteristik jenis tanah regosol pada umumnya profil tanah belum berkembang, tekstur tanah berpasir, geluh, struktur tanah remah gumpal lemah, infiltrasi sedang sampai tinggi dengan solum tebal. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah.



Gambar 2. 3 Peta Geologi Kota Yogyakarta

Sumber: Masterplan, 2021

2. Kondisi Sosial Ekonomi, Budaya, dan Kesehatan Masyarakat

a. Kependudukan

Jumlah penduduk, migrasi, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi jumlah timbulan sampah di Yogyakarta. Berikut adalah tabel pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 3 Pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2016-2021

No	Kemantren	Penduduk Tahun 2016 (Jiwa)	Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Kepadatan Penduduk tahun 2021 per Km ²	% Pertumbuhan Penduduk
1	Tegalrejo	36.693	37.416	12.858	1,97
2	Jetis	27.326	27.350	15.901	0,09
3	Gondokusuman	42.067	43.096	10.855	2,45
4	Danurejan	21.226	21.357	19.415	0,62
5	Gedongtengen	20.522	19.844	20.671	-3,30
6	Ngampilan	18.710	18.453	22.504	-1,37
7	Wirobrajan	27.925	28.064	15.945	0,50
8	Mantrijeron	35.324	35.608	13.643	0,80
9	Kraton	21.985	21.890	15.636	-0,43
10	Gondomanan	15.089	14.975	13.371	-0,76
11	Pakualaman	10.738	10.750	17.063	0,11
12	Mergangsan	31.948	31.971	13.840	0,07
13	Umbulharjo	68.403	70.818	8.721	3,53
14	Kotagede	33.326	34.632	11.281	3,92
	JUMLAH	411.282	416.224	12.807	1,20

Sumber: data kependudukan dalam portal Jogja Smart Service diolah 2022

Data penduduk tersebut berasal dari data penduduk Kota Yogyakarta yang tercatat secara administratif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS. Dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden dan juga melalui *e-census*. Pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang

tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi) yang merupakan komponen laju pertumbuhan penduduk yang menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Proyeksi data penduduk ini digunakan untuk dilakukan analisis besaran jumlah penduduk dan besaran timbulan sampah yang ada karena keduanya saling berkaitan satu sama lain. Melihat persentasi pertambahan penduduk dalam 5 tahun yaitu 1,2%, dapat diproyeksikan dalam 10 tahun ke depan, saat periodisasi *Masterplan* Pengelolaan Sampah berakhir, jumlah potensi timbulan sampah yang ada di Kota Yogyakarta akan bertambah pula 2,4% dari timbulan yang ada sekarang yaitu dari 290 ton/hari menjadi 296,96 ton/hari.

b. Sosial Ekonomi, Budaya

1) Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Yogyakarta

Kualitas pembangunan sebuah wilayah dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM ini memberikan Gerakan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, Kesehatan, dan Pendidikan. Nilai IPM Kota Yogyakarta tertinggi di Indonesia sejak tahun 2020. Kualitas Pendidikan masyarakat kota Yogyakarta dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah menunjukkan tingkat lama sekolah penduduk di atas usia 25 tahun sedangkan angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengestimasi harapan lama sekolah di masa depan yang dapat dienyam dalam melihat rata-rata proporsi setiap kelompok usia yang sekolah pada saat ini. Rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta dari tahun 2017 hingga saat ini selalu di atas rata-rata provinsi D.I Yogyakarta dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan di Kota Yogyakarta cukup bagus dibandingkan dengan daerah lain (Laporan Kinerja pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020).

Masyarakat Kota Yogyakarta rata-rata telah menyelesaikan sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas dan sebanding dengan lama waktu sekolah 12 tahun. Pada tahun 2021, jumlah masyarakat yang mengenyam Pendidikan tinggi baik di akademi, diploma III, Sarjana

Strata 1/2/3 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 menggambarkan besaran penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang Pendidikan baik sehingga meningkatkan kualitas kerjaa di Kota Yogyakarta. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti semakin banyak penduduk yang telah menyelesaikan Pendidikan tinggi.

Tabel 2. 4 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2016-2021

No	Urian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lulusan S1	61.150	61.203	60.964	62.176	62.480	63.231
2	Lulusan S2	6.493	6.611	6.702	6.960	7.068	7.199
3	Lulusan S3	785	791	794	813	836	850
4	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	68.428	68.605	68.460	69.949	70.384	71.280
5	Jumlah Penduduk	411.282	412.692	412.726	416.049	414.704	416.224
6	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,166	0,166	0,166	0,168	0,170	0,171

Sumber: Data Kependudukan dalam portal Jogja Smart Service diolah 2022

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020, sasaran peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan dengan peningkatan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusi. Selain itu juga didukung dengan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standar dan sarana prasarana pendidikan, penguatan data dan informasi, pengembangan budaya literasi, dan Pendidikan masyarakat dan pembinaan lembaga pendidikan keterampilan.

2) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Yogyakarta

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Besaran angka rasio ketergantungan ini memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang dalam usia kerja (usia produktif) memiliki tanggung jawab sebanyak 46 hingga 47 orang yang belum produktif dan/ atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016-2021 cenderung stabil di angka 0,46 atau 0,47.

Tabel 2. 5 Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2021 Kota Yogyakarta

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	89.522	88.800	88.299	87.880	86.127	85.653
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	29.442	30.807	31.991	33.616	35.513	35.963
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	118.964	119.607	120.290	121.496	121.640	121.616
4	Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	258.541	259.361	258.678	260.739	260.630	262.406
5	Rasio Ketergantungan	0,46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,46

Sumber: Data Kependudukan dalam portal Jogja Smart Service diolah 2022

Menurut RKPD Kota Yogyakarta tahun 2021, arah kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Yogyakarta ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah, lapangan

kerja, dan pengurangan angka kemiskinan. Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu kawasan dapat diukur menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

B. Kondisi Eksisting Persampahan Di Kota Yogyakarta

1. Sumber Sampah

Sumber sampah dari rumah di tingkat masyarakat kota Yogyakarta dikelola melalui beberapa model seperti berikut:

- a) Produksi sampah (rumah tangga) dikumpulkan di depan rumah dengan bak sampah, selanjutnya diambil oleh petugas sampah dengan gerobak sampah untuk ditampung di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS). Selanjutnya dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas dari dinas terkait ke tempat pemrosesan akhir.
- b) Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, selanjutnya dari TPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempat pemrosesan akhir.
- c) Sampah rumah tangga dipilih atau dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiap rumah tangga, dan kemudian dibawa ke bank sampah terdekat. Selanjutnya sampah yang dikumpulkan di bank sampah tersebut dijual ke pengepul. Sampah lainnya dikumpulkan di tempat pembuangan sampah

sementara untuk diangkut petugas sampah, dan dibuang ke tempat pemrosesan terakhir.

- d) Sampah rumah tangga dikumpulkan di *armroll* dan diangkut oleh petugas dengan truk sampah untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- e) Sampah rumah tangga dikumpulkan dan dibakar sedangkan sampah organik dikumpulkan di lubang tanah dan ditimbun.
- f) Model pengelolaan di masyarakat yang lainnya adalah orang dengan memilah kemudian melakukan 3R yaitu mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali yang masih bisa dipakai (*reuse*), dan mendaur ulang (*recycle*) sampah menjadi barang yang lebih bernilai. Pengelolaan 3R oleh masyarakat dilakukan secara berkelompok dengan membentuk bank sampah.

Sedangkan sampah yang bersumber dari Kawasan selain rumah tangga untuk keperluan komersil maupun non komersil sudah diambil oleh petugas sampah dari Pemkot Yogyakarta maupun pengambil sampah swasta.

2. Timbulan, komposisi, dan Karakteristik Sampah

Pada akhir Mei 2021 telah dilakukan survei yang sudah dilakukan oleh pihak Bappeda kota dengan berpedoman pada SNI, selain survei timbulan dilakukan juga survey sarana dan prasarana kota Yogyakarta. Ringkasan dari timbulan sampah disajikan pada table berikut ini.

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta 2021

Parameter	Nilai	Satuan
Jumlah Penduduk	375.589	Jiwa (BPS, 2020)
Timbulan sampah rata-rata permukiman	0,51	Kg/orang/hari
Timbulan sampah permukiman	190.530	Kg/hari
	190,53	ton/hari
Timbulan sampah non permukiman	108.341	Kg/hari
	108,34	ton/hari
Total timbulan sampah	298.871	Kg/hari
	298,87	ton/hari
Timbulan sampah rata rata total	0,80	Kg/orang/hari

Sumber: data sekunder diolah 2022

Keterangan:

1. *Timbulan sampah permukiman diperoleh dengan mengalikan koefisien timbulan sampah permukiman yang diperoleh dari hasil survey dengan jumlah penduduk dari data BPS tahun 2020*
2. *Timbulan sampah non permukiman diperoleh dengan mengalikan koefisien timbulan sampah non permukiman per unit dilakukan dengan total keseluruhan unit di kota Yogyakarta.*

Total timbulan sampah per hari sebesar 298,87 ton dan tingkat produksi sampah per kapita 0,80 kg/hari adalah nilai yang tinggi melebihi standar nasional. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus dan perlu dilakukan perencanaan yang matang mengenai sarana dan prasarana persampahan kedepan.

Dari timbulan sampah yang ada terdapat karakteristik sampah diantaranya sampah kain, logam, gelas/kaca, karet/kulit kayu, kretas, organik dan plastik. Dari hasil temuan dilapangan dengan konfirmasi pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) komposisi mayoritas sampah dari pemukiman dan nonpemukiman adalah fraksi organik berkisar 50% dari total sampah. Sehingga jika akan menyelesaikan sampah dengan segera maka perlu menjadikan sampah organik sebagai sasaran utama

pengelolaan sampah. alasan lain yang menjadikan prioritas utama adalah sebagai berikut:

- a) Sampah organik mudah terdegradasi menghasilkan polusi berupa air lidin, gas rumah kaca dan bau.
- b) Sampah organik mudah diolah memakai teknologi sederhana
- c) Sampah organik memiliki nilai ekonomi rendah sehingga tidak diminati pemulung dan bank sampah.
- d) Sampah organik di TPST memberi peluang adanya peternakan ilegal.
- e) Dapat menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan bidang pertanian dan perikanan.

Untuk itulah perencanaan sarana dan prasarana persampahan kota Yogyakarta ini difokuskan pada pengelolaan fraksi organik yang harus sudah terpilih dari sumber.

3. Sistem Pengelolaan Sampah

a. Subsistem Peraturan dan Kelembagaan

Sistem Pengelolaan persampahan ini mengacu kepada beberapa peraturan, salah satu diantaranya yang dijadikan patokan dalam *masterplan* ini adalah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 67 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, untuk mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025. Mengacu kepada laporan Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah) penanganan sampah saat ini sudah melebihi target, namun masih

diperlukan banyak pembenahan untuk peningkatan pengolahan sampah sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPST secara signifikan.

Selain subsistem peraturan, dapat dilihat dari subsistem kelembagaan dalam hal ini kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2020. Dalam bidang pengelolaan persampahan terdapat seksi penanganan persampahan dan seksi pengelolaan retribusi kebersihan.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 2. 4 Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Persampahan memiliki fungsi:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengelolaan Persampahan;

- 2) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 3) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan persampahan;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penanganan persampahan;
- 5) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan retribusi kebersihan;
- 6) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengelolaan Persampahan;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengelolaan Persampahan; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Seksi Penanganan Persampahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada seksi penanganan persampahan;

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penanganan persampahan;
- 3) Pelaksanaan penanganan persampahan;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan sampah;
- 5) Pelaksanaan pengaturan, pendistribusian dan pengawasan terhadap sarana dan tenaga pengangkutan sampah dan pembersihan sampah;
- 6) Penetapan lokasi tempat tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu;
- 7) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan penanganan persampahan;
- 8) Pelaksanaan pengendalian pengelolaan sampah oleh perorangan dan lembaga;
- 9) Pelaksanaan pengadaan dan penerapan teknologi baru untuk pengurangan sampah;
- 10) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada seksi penanganan persampahan;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada seksi penanganan persampahan;
- 12) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Penanganan Persampahan;
- 13) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Penanganan Persampahan;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Penanganan Persampahan; dan

15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan retribusi kebersihan;
- 3) pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan;
- 4) pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi kebersihan;
- 5) pelaksanaan operasional pemungutan retribusi kebersihan;
- 6) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi kebersihan di wilayah;
- 7) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan;
- 8) pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan;
- 9) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan;
- 10) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan;
- 11) pelaksanaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Retribusi Kebersihan; dan

12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Selain pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah, terkait dengan upaya pengurangan sampah terdapat kegiatan-kegiatan pendampingan masyarakat untuk mendukung upaya tersebut. Kegiatan pendampingan dan edukasi masyarakat seperti bank sampah, sekolah adiwiyata, kampung hijau, yang diampu oleh seksi pengembangan sumberdaya lingkungan hidup di bawah bidang pengembangan kapasitas dan pengawasan lingkungan hidup. Dalam upaya melaksanakan pengurangan sampah, seksi ini dibantu oleh fasilitator kelurahan yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan pelaporan kegiatan bank sampah.

Seksi pengembangan sumber daya lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengembangan sumber daya lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Lingkungan Hidup;
- 5) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan masyarakat peduli Lingkungan Hidup;

- 6) Pelaksanaan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;
- 8) Pelaksanaan publikasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 9) Pelaksanaan fasilitasi kegiatan adipura, kalpataru dan sekolah adiwiyata;
- 10) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup;
- 12) Pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup;
- 13) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup;
- 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Dengan demikian, upaya-upaya edukasi dan pendampingan masyarakat untuk mendorong pengurangan sampah diampu oleh bidang di luar pengelolaan persampahan. Seksi pengembangan sumber daya lingkungan

hidup juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan acara rutin, Gerakan massal ataupun seremonial untuk kampanye peduli sampah seperti hari peringatan sampah nasional, lomba bank sampah, sekolah adiwiyata, dan kampanye pada *Car Free Day*.

Selain seksi-seksi tersebut, terdapat seksi pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bawah bidang perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup yang memiliki kewenangan untuk:

- 1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan sumber pencemar
- 3) Pelaksanaan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang bersumber dari kegiatan dan/ atau usaha
- 4) Pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik yang mengandung B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun di wilayah permukiman
- 5) Pelaksanaan pengumpulan sampah spesifik untuk sampah di perairan
- 6) Pelaksanaan penentuan baku mutu sumber pencemar dan baku kerusakan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Pembuangan sampah liar di sembarang tempat maupun sungai masih terjadi di Kota Yogyakarta. Seksi PPLH berperan untuk menangani timbulan sampah yang dibuang ke wilayah sungai dan juga melaksanakan edukasi

untuk mengurangi sumber pencemaran sungai oleh sampah kepada masyarakat di tepi sungai.

Sesuai dengan ulasan fungsi dari masing masing bidang dengan seksi-seksi yang ada harus bersinergi dengan kompak dalam melaksanakan pengelolaan persampahan, yang muncul akibat pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang diluar peruntukannya. Selama ini masih dijumpai pembuangan sampah B3 ke TPS yang hanya digunakan untuk Sampah Rumah Tangga/ Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SRT/SSRT). Pembinaan untuk membuang sampah sesuai dengan jenis sampah ditidaklanjuti melalui sinergi antara ketiga bidang tersebut. Selain bidang-bidang tersebut, SDM yang bergerak di bidang persampahan tidak hanya berasal dari DLH kota Yogyakarta.

Melihat dari sisi kelembagaan yang ada untuk pengelolaan persampahan di kota Yogyakarta antara lain adalah Seksi Kebersihan Pasar (Bidang Sarana Prasarana, Kebersihan, Keamanan, dan Ketertiban Pasar) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, memiliki tugas untuk mengelola kebersihan di area pasar untuk seluruh pasar yang ada di Kota Yogyakarta. Sampah jumlahnya signifikan sekitar 20 ton/hari yang sebagian besarnya adalah fraksi organik.

Selain itu ada UPT pengelolaan sampah Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan, mengelola sampah di Kawasan cagar budaya yang sementara ini mencakup Kawasan Tugu hingga Kraton.

Kemudian tentu peran kunci Bappeda dalam pembuatan *Masterplan* Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta sangat penting sehingga perlu dijelaskan kelembagaan dari Bappeda. Susunan Organisasi Bappeda Kota Yogyakarta jika merujuk kepada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2020 adalah sebagai berikut : Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penelitian, Inovasi dan Pengembangan. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan diganti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun perubahannya adalah pada ketugasan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta adanya penyederhanaan birokrasi.

b. Subsistem Peran Masyarakat/Swasta/Perguruan Tinggi

Peran serta masyarakat saat ini dalam kegiatan pengelolaan sampah meliputi pembayaran retribusi kebersihan/persampahan, melaksanakan pemilahan sampah kemudian menyetorkan hasil pilahan ke bank sampah, dan melakukan pendaurulangan sampah secara mandiri.

Tabel 2. 7 Pengelolaan sampah

Kawasan	Daur Ulang	
	Menlakukan (%)	Tidak melakukan (%)
Pemukiman	18	82
Non Pemukiman	19	81

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan Tabel 2.7 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat dari pemukiman maupun non pemukiman tidak melakukan daur ulang sampah. Kegiatan daur ulang dilaksanakan hanya oleh sebagian kecil masyarakat baik yang tinggal maupun tidak tinggal di pemukiman, kegiatan daur ulang yang dilakukan adalah dengan cara pengomposan dan pembuatan ekoenzim dari sampah organik.

Meskipun masih sedikit, saat ini terdapat 513 bank sampah yang tesebar di wilayah kota Yogyakarta dengan tingkat keaktifan mencapai 80%. Pengelolaan bank sampah tersebut didampingi oleh fasilitator kelurahan yang ditunjuk oleh DLH kota Yogyakarta untuk berperan aktif dalam kegiatan pembatasan dan pengurangan sampah. Pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah terdiri dari pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali serta pendaurulangan sampah dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembatasan timbulan sampah

Pembatasan timbulan sampah kota Yogyakarta ini dilaksanakan melalui penyusunan dan sosialisasi surat edaran mengenai:

- a) Pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di retail modern
- b) Sekolah adiwiyata
- c) Pembatasan timbulan sampah di restoran/warung makan
- d) Pembatasan timbulan sampah di pasar tradisional
- e) Pembatasan timbulan sampah di tempat ibadah
- f) Gerakan sumber bersih, gerakan untuk menjaga kebersihan mulai dari sumber timbulan sampah
- g) Lubang cedas organik (biopori)
- h) Pembatasan timbulan sampah di perkantoran

2) Pemanfaatan kembali dan daur ulang

Pemanfaatan dan daur ulang sampah oleh masyarakat kota Yogyakarta saat ini dilakukan melalui:

- a) Pemilahan mandiri dan pelapak

Pemilahan mandiri dan pelapak sampah sangat berperan dalam mengurangi jenis sampah anorganik meliputi sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Jenis sampah tersebut masih bernilai karena dapat di daur ulang. Kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor ini dimulai dari pengumpulan sampah, pemilahan, pembersihan, pemipihan, pengemasan, dan dibawa ke pabrik daur ulang sampah.

b) Bank sampah

Pengembangan bank sampah yang dilakukan untuk mandat kementerian lingkungan hidup bersifat rekayasa sosial yang mengajarkan masyarakat dalam hal memilah sampah, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengelola sampah secara bijak. Peran dan eksistensi bank sampah diperkuat secara hukum dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* melalui bank sampah.

Dalam upaya untuk mengurangi sampah rumah tangga, saat ini bank sampah mampu menyerap sampah anorganik yang layak jual dan menyalurkannya ke pelapak. Sampah organik saat ini belum tertangani meski DLH Kota Yogyakarta telah melaksanakan program pelatihan pengomposan sampah organik skala rumah tangga dan melakukan pembagian komposter. Penerapan program ini dalam kehidupan sehari-hari belum berjalan optimal karena keengganan untuk melakukan pengolahan sampah dengan proses yang rumit dan memerlukan ketelatenan. Peran serta masyarakat khususnya dalam hal pengurangan sampah masih relatif kecil. Meski Bank Sampah sudah dibentuk di tingkatan RW, namun total pengurangan sampah masih dibawah 2 ton/hari.

Peran sektor swasta dan perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan karena selama ini masih sedikit kerjasama yang dijalin oleh

pemerintah dengan dua sektor tersebut. Di Kota Yogyakarta terdapat banyak perguruan tinggi yang berpotensi sebagai penghasil sampah yang cukup besar namun di sisi lain dapat membawa manfaat dalam hal kerjasama pengembangan teknologi pengolahan sampah.

Sektor swasta juga belum menunjukkan inisiatif untuk membantu Pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Sektor pengelolaan sampah mandiri perlu segera diakselerasi karena target pengurangan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 bertumpu pada pengolahan sampah mandiri.

Sementara pihak Perguruan Tinggi sebenarnya sudah banyak mengembangkan teknologi tepat guna seperti pirolisis, gasfikasi, komposter, biogas, material bangunan dan lain sebagainya. Namun teknologi ini belum nampak diaplikasikan di Sarana dan Prasarana Persampahan milik DLH. Untuk itu perlu lebih sinergi antara berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan persampahan bersama.

Peran Perguruan Tinggi juga dapat dilakukan dengan mengajukan proposal pendanaan dari luar negeri untuk pengelolaan sampah khususnya sampah plastik dan perairan. Penawaran pendanaan yang ada misalkan GCF (*Green Climate Fund*) dan AEPW (*Alliance to End Plastic Waste*). Proposal ini pada umumnya membutuhkan dana pendamping (*co-financing*) yang dapat memakai dana APBD. Sehingga sebenarnya Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat disinergikan untuk dapat meraih pendanaan besar dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeniran, A. E., Nubi, A. T., & Adelopo, A. O. (2017). Solid waste generation and characterization in the University of Lagos for a sustainable waste management. *Waste Management*, 67, 3–10.
- Admin. (2021). *13 Contoh Responsibilitas disertai dengan penjelasan*. Apacontoh.Com. <https://apacontoh.com/responsibilitas/>
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Artiningsih, N. K. A. (2008). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)*. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Azwar, A. (1996). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Mutiara Sumber Widya*. Jakarta.
- Bappeda. (2021). *Masterplan Pengelolaan Persampahan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Bappeda.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.
- Fadhilah, A., Sugianto, H., Hadi, K., Firmandhani, S. W., Murtini, T. W., & Pandelaki, E. E. (2011). Kajian Pengelolaan Sampah Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. *Modul, 11*, 269246.
- Fadhiah, N., Fatmawati, F., & Parawu, H. E. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN BERBASIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA MAKASSAR. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(2), 108–118.
- Fitria, R., Samadikun, B. P., & Priyambada, I. B. (2016). *Studi Timbulan, Komposisi dan Karakteristik dalam Perencanaan Pengelolaan Sampah Universitas Diponegoro Studi Kasus: Fakultas Psikologi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat*. Diponegoro University.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan pemanfaatan sampah*. Yayasan Idayu.
- Hendra, Y. (2016). Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(1), 77–91.
- Husadi, S. P., & Namara, I. (2019). Studi Kelayakan Infrastruktur Penunjang Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R (studi kasus : Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Rekayasa Sipil*, 5(1), 11–15.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. PT. Bumi Aksara.

- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(1), 12–25.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank Publications.
- Masrida, R. (2017). Kajian timbulan dan komposisi sampah sebagai dasar pengelolaan sampah di kampus ii universitas bhayangkara jakarta raya. *Journal of Environmental Engineering and Waste Management*, 2(2), 69–78.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2007). *Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025*.
- Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.12.003%0Ahttps://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/30/027/30027298.pdf?r=1&r=1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2015.04.004
- Pinontoan, O. R., & Sumampouw, O. J. (2019). *Dasar Kesehatan Lingkungan*. Deepublish.
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1505>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.
- Shobri, A. (2014). *Program pilah sampah plastik, kardus, kertas dalam meningkatkan nilai kebersihan siswa dan pendapatan sekolah di SDN Tambakaji 04, SDN Ngaliyan 01 dan SDN Ngaliyan 03 [IAIN Walisongo]*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3890/>
- Sinaga, T. S. (2021). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Pt. Astra Honda Motor Medan. *Juripol*, 4(1), 258–266. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11044>
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suning, S., & Muryanto, D. (2016). KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN PENGOLAHAN PERSAMPAHAN KABUPATEN SIDOARJO BERBASIS TPST. *WAKTU: Jurnal Teknik UNIPA*, 14(1), 61–68.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>
- Suwerda, B. (2012). Bank Sampah (kajian teori dan penerapan). *Yogyakarta: Pustaka Rihama*.
- Undang - Undang RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Yogyakarta, P. K. (2017). *Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022*.
- Zhang, H., Liu, J., Wen, Z., & Chen, Y.-X. (2017). College students' municipal solid waste source separation behavior and its influential factors: A case study in Beijing, China. *Journal of Cleaner Production*, 164, 444–454.